



Radar Bali

KASUS PERDIN

Dewan Dicecar 54 Pertanyaan

DENPASAR - Setelah Fraksi Demokrat dan Golkar yang diperiksa Kejari Denpasar. Kini giliran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Denpasar yang dipanggil. Anggota Fraksi PDIP yang diperiksa antara lain I Kadek Agus Arya Wibawa, AA Putu Gede Wibawa, dan Wayan Warka.



MAULANA SANDUJAY/RADAR BALI

DICEGAT WARTAWAN: AA Putu Gede Wibawa dicegat wartawan sesuai diperiksa di Kejari Denpasar.

Mereka diperiksa sekitar tiga jam. Dari pukul 09.00 -12.30. Gede Wibawa usai pemeriksaan mengatakan dirinya dicecar jaksa penyidik dengan 54 pertanyaan. Wibawa diperiksa berbarengan dengan Arya Wibawa dan Warka. Namun, ketiganya diperiksa dalam ruangan berbeda dengan jaksa berbeda pula

► Baca **Dewan...** Hal 35

2013

Perjalanan Dinas 31 Kali

DEWAN

Sambungan dari hal 25

Untuk Kadek Agus Arya Wibawa, panggilan ini merupakan panggilan kedua setelah pada panggilan pertama sempat mangkir. Menurut Wibawa, dirinya ditanya hubungan dengan Sekwan (sekretaris dewan) atau tidak. Saya katakan ada tapi sebatas hubungan sebagai anggota dewan," terang Wibawa kemarin (25/7).

Selain itu, Wibawa juga ditanya-

kan tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dijabat IG Made Patra, yang saat ini sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di Lapas Kerobokan.

Disinggung tentang aliran dana perjalanan dinas, Wibawa mengaku tidak mengetahui. Dia juga membantah pernah menerima uang saku selain yang sudah ditetapkan. "Tidak pernah terima uang lain selain uang saku," bantahnya. Perjalanan dinas dewan

rata-rata 31 kali selama 2013. Dijelaskan Wibawa, anggaran sekitar Rp 10 - 12 miliar untuk 45 orang anggota dewan.

Selain ketiga anggota dewan, kejaksaan juga memanggil I Made Suwitra, Kabag Keuangan DPRD Kota Denpasar. Namun, Suwitra batal diperiksa karena jaksa sedang ada agenda lain. Sampai saat ini sudah ada lima dewan yang sudah diperiksa. Di antaranya Nuada (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi

Demokrat), I Putu Oka Mahendra (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Golkar), I Nyoman Tamayasa (anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Indonesia Raya), AA Susruta Ngurah Putra, dan Ketut Arya Saputra (anggota Fraksi Demokrat).

Sayangnya, Kasi Intel Kejari Denpasar, saat dikonfirmasi tidak ada jawaban. Beberapa kali dihubungi lewat telepon tidak diangkat meski terdengar nada sambung aktif. (san/pit)

Edisi : Selasa, 26 Juli 2016

Hal : 25 dan 35



Radar Bali

172 Pejabat Terancam "Ditendang"

Dampak Penciutan Organisasi Perangkat Daerah

MANGUPURA - Sebanyak 172 orang terancam dilucuti dari jabatannya di Pemkab Badung. Tak hanya itu, para pejabat eselon ini juga mesti kehilangan segala fasilitas yang melekat.

Hal itu dilontarkan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, dikonfirmasi usai Sidang Paripurana DPRD Badung, Senin (25/7). Katanya, pelucutan jabatan ter-

hadap ratusan orang pejabat ini sebagai imbas dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Cuma perlu kami sampaikan akan terjadi penciutan-penciutan. Kami punya eselon 2A sampai eselon 4B ada 600 lebih. Dengan adanya OPD yang baru ini, mungkin ada 172-an orang yang tidak akan mendapat (kehilangan, Red) jabatan," tegasnya.

Dia menjelaskan, penerapan PP 10/2016 itu baru akan dilakukan setelah APBD

Ini (penciutan) karena Undang-undang, bukan karena Giri Prasta ya, tapi karena perintah PP!"

Nyoman Giri Prasta

Bupati Badung

tahun 2017 disahkan. "Karena itu belum final, kami belum bisa sahkan dulu (OPD)," tandas Giri Prasta.

Dijelaskan, penciutan peja-

bat di Kabupaten Badung itu bukan karena tindakan politis tetapi pihaknya mengklaim ini karena menerapkan undang-undang yang berlaku. "Ini (penciutan) karena Undang-undang, bukan karena Giri Prasta ya, tapi karena perintah PP," jelasnya pejabat asal Desa Pelaga, Petang ini.

Dikatakan, PP 18/2016 memerintahkan penciutan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Misalnya ada dua SKPD akan digabung menjadi satu SKPD. Maka, salah satu pimpinan SKPD maupun pe-

jabat di bawahnya harus ada yang legawa karena tersingkir. Meski demikian, ditegaskan, pimpinan SKPD sebelumnya akan tetap diberikan tanggungjawab hingga berakhirnya tahun anggaran 2016. "Kami harus tanggap. Misalnya ada dua kepala dan satu dinas, kami akan lakukan pengisian di bulan Januari 2017. Biar tuntas APBD tahun 2016 ini. Jangan sampai dia tidak mau bekerja dan menyerahkan tanggungjawabnya pada yang baru bertugas. Kami tidak mau itu," pungkasnya. (dwi/yor)

Edisi : Selasa, 26 Juli 2016

Hal : 28